

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam ketentuan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Hukum yang tentunya segala prosedur dan pengaturan yang ada harus sesuai dengan kepastian hukum yang ada di Indonesia.

Dalam suatu perkara pidana pemeriksaan di dalam suatu proses peradilan pada hakikatnya bertujuan untuk menemukan kebenaran materiil (*materielle waarheid*) terhadap perkara yang ada. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai usaha yang dibutuhkan dalam mengungkap suatu perkara dalam tahap pemeriksaan pendahuluan seperti halnya proses penyidikan dan penuntutan maupun dalam tahap persidangan pada perkara yang ada.

Menurut Wirjono Prodjodikoro yang dimaksud tindak pidana terhadap kepentingan agama sering juga disebut sebagai penodaan agama aspek mengenai hal tersebut tindak pidana terhadap kepentingan agama diatur dalam KUHP dengan tujuan melindungi kepentingan agama yang ada. Dalam KUHP ada tiga kepentingan yang seharusnya dilindungi yaitu kepentingan individu, kepentingan masyarakat dan kepentingan negara yang masing-masing diperinci ke dalam sub jenis kepentingan lagi<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, hlm. 6.

Penistaan Agama merupakan suatu bentuk penyimpangan perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang ada, adapun penyebab terjadinya suatu tindak pidana penistaan agama ialah adanya seorang yang mengeluarkan perasaan atau perbuatan di muka umum yang pada pokoknya dapat menimbulkan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia hal tersebut dapat menimbulkan bahaya, dan menimbulkan gangguan kesejahteraan bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat di Indonesia.

Dalam ketentuan Pasal 156a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sering disebut sebagai pasal penodaan agama bisa dikategorikan sebagai delik terhadap agama. Di Indonesia, Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama yang selama ini dijadikan dasar hukum, selain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, upaya penindakan aliran-aliran sesat hanya memuat rumusan dengan sanksi paling lama lima (5) tahun pidana penjara.

Pada kasus penistaan agama sering kali dianggap sebagai penilaian dari subjektifitas masyarakat terhadap ajaran yang dianut oleh seseorang apakah menistakan agama atau tidak, ucapan dari seseorang yang dapat menimbulkan penilaian tersendiri bahwa dari ucapan tersebut mengandung unsur yang menistakan suatu agama. Sering kali hal tersebut hanya merupakan persepsi orang yang menjadikan berita dan mengganggu stabilitas masyarakat di suatu lingkungan masyarakat padahal dapat diduga dan bisa saja hal tersebut hanya kesalahpahaman saja dan dimungkinkan itu hanya isu-isu yang dikeluarkan oleh

orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Meskipun sudah mencapai pembuktian dalam sidang pengadilan, Majelis Hakim sering kali mendapat intervensi dari para pihak yang emosinya sedang bergejolak di depan pengadilan. Majelis Hakim bisa saja terkesan terburu-buru dalam memutus perkara karena adanya desakan dari seseorang yang emosinya sedang bergejolak pada saat proses pengadilan dilakukan sehingga terkadang keyakinan hakim dalam memutus perkara pun sering terabaikan. Padahal keyakinan Majelis Hakim merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam memutus suatu perkara. Dalam proses peradilan, pada tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan, tahap pembuktian merupakan hal yang penting karena memiliki peranan yang menentukan apakah seorang Terdakwa tersebut benar bersalah atau tidak, dan sering kali proses pembuktian tidak berjalan sesuai dengan aturan hukum yang ada.

Penegak hukum dalam beracara memiliki pedoman tersendiri yang memiliki tujuan untuk melindungi hak-hak asasi mereka yang diduga melakukan pelanggaran hukum, sehingga akan menciptakan suatu penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan dan ketertiban sesuai ketentuan Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang dasar 1945, yang juga memuat mengenai kepastian hukum. Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yang pertama perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum

itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>2</sup>

Hakim dalam menjatuhkan putusan suatu kasus selalu mendasari pada alat bukti yang sah. Ketentuan yang mengatur mengenai pembuktian dalam acara pemeriksaan perkara pidana terdapat dalam Pasal 183 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang merumuskan:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”

Berdasarkan ketentuan tersebut terdapat ketentuan bahwa pembuktian harus didasarkan pada alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah yang dimaksud terdapat dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan alat bukti yang sah yang membantu hakim dalam mengambil keputusan seperti :

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa.

---

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Keempat, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2012, hlm. 137.



Dalam hal ini untuk menentukan seseorang dapat dijatuhi hukuman pidana sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah dan hakim meyakini atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, terdakwa terbukti bersalah ( Pasal 183 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ) berkaitan dengan penistaan agama harus dibuktikan kebenarannya bahwa terdakwa benar-benar bersalah atau tidak secara materiil, dengan kata lain mencari dan menemukan bukti-bukti untuk mempermudah suatu proses perkara pidana.

Dalam menafsirkan suatu perbuatan termasuk dalam kategori dari penodaan agama penegak hukum khususnya hakim dan jaksa sangat bergantung dari keterangan para ahli yang memberikan keterangannya di pengadilan. Hal tersebut dikarenakan dalam rumusan tindak pidana sendiri tidak terdapat penjelasan dan penafsiran yang jelas tentang perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam penafsiran yang menyimpang atau penyesatan dan bisa saja suatu yang berisikan permusuhan.<sup>3</sup>

Dari uraian peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah hukum yang telah penulis jelaskan di atas maka peraturan tersebut dan kaidah hukum yang tertuang di atas haruslah dipatuhi secara taat, mengingat bahwa Negara Indonesia merupakan Negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3), peraturan serta kaidah hukum yang ada sudah sepatutnya harus ditaati agar dapat berjalan sesuai dengan cita hukum nasional.

---

<sup>3</sup> <http://www.lbhbandung.or.id/media/2017/03/Analisis-Pasal-156-a-KUHP-dan-UU-No-1-Tahun-1965-Terkait-Tindaak-Pidana-Penodaan-Agaama-Yang-Terjadi-di-Jawa-Barat.Pdf>. Diakses pada tanggal 28 November 2018 Pukul 20.30 Wib

Bahwa kemudian dirasa sangat disayangkan dalam kasus yang penulis angkat dalam putusan Nomor : 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn yang dari putusan tersebut dirasa penulis terdapat kecacatan hukum serta kejanggalan-kejanggalan yang tidak rasional sehingga penerapan hukum yang diterapkan dalam putusan pengadilan tersebut tidaklah memberikan rasa kepastian hukum, kemudian dapat penulis uraikan secara garis besar, bahwa kronologi kasus yang terdapat dalam putusan tersebut dan penjatuhan vonis yang diberikan kepada terdakwa Meliana belum memberikan rasa keadilan. Adapun kronologi kasus tersebut ialah sebagai berikut Dalam perkara Nomor : 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn bahwa terdakwa ialah seorang perempuan berusia 44 tahun yang didakwa melakukan tindak pidana penistaan agama yang diatur dalam Pasal 156a huruf (a) KUHP terdakwa dianggap telah melakukan penistaan agama karena memperlakukan volume suara adzan di masjid Al-Makhsun pada 22 Juli 2016 pada saat itu Meliana sedang berbelanja di warung Kasini atau Kak Uo kemudian Meliana menyampaikan keluhannya kepada pemilik warung Kasini terhadap suara adzan yang dirasa oleh Meliana sedikit besar dari biasanya, bahwa kasus bermula ketika pada 22 Juli 2016 sekitar jam 7 pagi terdakwa datang ke warung Saksi Kasini untuk berbelanja seperti biasanya dengan seponatan terdakwa menyatakan kepada saksi Kasini “Kak tolong bilang sama uak itu, kecilkan suara Masjid itu kak sakit kupingku, ribut” dalam hal ini terdakwa membantah kalimat ini dan menyatakan bahwa kalimat yang sebenarnya diucapkan “kak dulu suara Masjid tidak begitu besar, sekarang kok agak besar” pada saat terdakwa menyampaikan keluhannya tersebut hanya ada terdakwa dan saksi Kasini kemudian saksi Kasini menyampaikan ucapan

terdakwa tersebut kepada ayahnya yang bernama Kasidik dan juga adiknya yang bernama Hermayanti setelahnya lebih dari 1 (satu) minggu kemudian tepatnya pada 29 Juli 2016 pukul 10 pagi saksi Kasidik bertemu dengan ketua BKM yaitu saksi Sjaaji atau Sayuti dan menyampaikan “Pak Sayuti cina depan rumah kami itu, gimana ya minta kecilkan suara volume masjid kita” setelahnya sekitar pukul 7 malam ada beberapa orang datang ke rumah terdakwa kemudian semua saksi yang ada di rumah terdakwa kembali ke Masjid dan disusul oleh suami terdakwa bernama Lian Tui untuk meminta maaf, sekitar pukul 8 (delapan) malam datang seorang polisi bernama Saksi Kuntoro ke rumah terdakwa dan menyuruh terdakwa dan suaminya untuk ke Kantor Kelurahan untuk membicarakan permasalahan yang mana dikatakan bahwa terdakwa melarang adzan, setelah pukul 11 (sebelas) malam masyarakat sekitar menjadi ramai dan berteriak “bakar..bakar Allahu Akbar, Allahu Akbar” dan setelahnya saksi Alrifai Zuherisa dan saksi Budi Ariyanto bersama dengan masa lainnya melempari dan merusak rumah terdakwa serta merusak Vihara/Pekong yang ada di Kota Tanjungbalai dari adanya kejadian tersebut pada tanggal 2 Desember 2016 saksi Haris Tua Marpaung saksi Dailami dan saksi Rifai membuat surat pernyataan perihal meminta kepada pihak Kepolisian agar melakukan penyidikan terhadap Meliana yang dianggap telah melakukan penistaan dan pelecehan serta menyatakan rasa benci terhadap kegiatan ibadah agama Islam di Masjid Al Makhsum Kota Tanjungbalai kemudian pada tanggal 14 Desember 2016 Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Independen Bersatu (AMMIB) mengajukan surat kepada ketua MUI Kota Tanjungbalai perihal memohon untuk dilakukannya Audiensi dan Fatwa

MUI terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh etnis Tionghoa bernama Meliana, setelahnya pada 19 Desember 2016 MUI Kota Tanjungbalai telah melaksanakan rapat Komisi Fatwa MUI Kota Tanjungbalai dan memutuskan untuk memohon Fatwa dari DP. MUI Provinsi Sumatera Utara atas penistaan agama pada tanggal 24 Januari 2017 Komisi Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara telah menghasilkan Fatwa tentang penistaan agama yang telah dilakukan oleh Meliana di Kota Tanjungbalai dengan kesimpulan bahwa ucapan yang disampaikan oleh Meliana atas suara Adzan yang berasal dari Masjid Al Makhsun merupakan Perendahan dan Penistaan terhadap Agama Islam, kemudian pada tanggal 13 Agustus 2018 Penuntut Umum menuntut Meliana dengan dakwaan primair yaitu pasal 156a huruf a KUHP dan tuntutan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada di penahanan sementara Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa Meliana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dimuka umum melakukan penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Dari apa yang telah diuraikan maka penulis berpendapat bahwa ada hal yang menyimpang atau tidak sesuai dalam putusan ini, dijelaskan bahwa alat bukti yang digunakan dalam putusan ini ialah keterangan saksi yang memiliki pengertian menurut Pasal 26 dan angka 27 juncto Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP berdasarkan penafsirannya memiliki arti ialah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri,



lihat sendiri dan alami sendiri maka dalam sidang perkara pidana hampir semua dari perkara pidana selalu berdasar kepada pemeriksaan keterangan saksi, keterangan saksi dalam ketentuan Pasal 1 angka 27 merupakan ketentuan yang menjadi pedoman pembuktian dalam pemeriksaan persidangan di pengadilan terhadap perkara-perkara pidana, namun yang menarik ialah pengertian dan kriteria tentang saksi atau keterangan saksi dalam hukum acara pidana tersebut berubah sejak Mahkamah Konstitusi memutus perkara uji materi KUHAP melalui putusan nomor 65/PUU-VIII/2010 yang diputuskan pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2011 pada sidang pleno terbuka Mahkamah Agung yang diketuai oleh Mahfud MD, perkara uji materi tersebut berawal dari permohonan pengujian Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP yang diajukan oleh Yusril Ihza Mahendra yang mengajukan empat orang saksi yang meringankan untuk dirinya permohonan uji materi ini dilakukan karena penyidik Kejaksaan Agung pada saat itu menolak empat saksi yang diajukan oleh Yusril Ihza Mahendara, namun Kejaksaan beralasan keempat saksi yang menguntungkan ini dianggap tidak memenuhi kualifikasi sebagai saksi yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri sesuai ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHAP.

Dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memutuskan sebagai berikut :

- a. Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) ; Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tentang tidak dimaknai termasuk **“orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri”**

- b. Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan (4); serta pasal 184 ayat (1) KUHAP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi** dalam pasal 1 angka 26 dan 27 Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan (4); serta pasal 184 ayat (1) KUHAP. tidak dimaknai pula **“orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri lihat sendiri dan alami sendiri”**

Berdasarkan kutipan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diuraikan

tersebut maka dapat dipahami bahwa semenjak putusan tersebut ditetapkan maka telah terjadi pergeseran makna saksi/keterangan saksi yang diatur oleh KUHAP, jika sebelumnya dalam keterangan KUHAP saksi merupakan orang yang dapat menerangkan peristiwa pidana berdasarkan apa yang ia alami, dengar dan lihat sendiri kemudian setelah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak sepenuhnya dibenarkan demikian karena makna saksi/keterangan saksi termasuk juga orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana meskipun keterangan tersebut tidak ia dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri. Hal tersebut sangatlah menarik karena sesuai ketentuan Pasal 185 KUHAP, bahwa dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain *“testimonium de auditu”* sedangkan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak menutup kemungkinan kesaksian *testimonium de auditu* juga dapat dikalsifikasikan sebagai keterangan saksi, sehingga disini terjadi pergeseran makna/ keterangan saksi dalam KUHAP.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 kesaksian harus didengar dilihat dan dialami sendiri apabila dilihat kembali pada putusan nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn maka dapat disimpulkan secara garis besar bahwa dalam putusan tersebut memuat keterangan dari beberapa orang saksi dan hanya ada satu orang saksi yang melihat mendengar dan mengalami sendiri pada saat terdakwa pertama kali mengeluhkan suara volume adzan yang dirasa semakin besar terdakwa menyampaikan keluhannya hanya pada saksi Kasini dan kemudian ada keterangan dari saksi Kuntoro yang menyatakan bahwa saksi mengetahui adanya masalah antara pihak BKM Masjid Al-Maksum dengan terdakwa Meliana saksi mengetahui setelah saksi berada di Kantor Kelurahan Tanjungbalai Kota I dalam proses mediasi bahwa saksi menyatakan mengetahui melalui cerita dari masyarakat sekitar bahwa terdakwa menyatakan “suara dimasjid itu kok besar dulu ga begitu” dari apa yang diucapkan saksi dalam proses pembuktian tentu saja secara terang dan jelas bahwa saksi menegaskan bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung dan mendengar sendiri pada saat terdakwa Meliana menyampaikan keluhannya terkait volume suara adzan saksi mengetahui melalui cerita dari masyarakat, dan juga terdapat keterangan dari saksi Shahir Tanjung yang merupakan salah satu pengurus dari masjid Al-Maksum saksi menyatakan bahwa saksi melihat ada banyak orang yang berkumpul di Masjid dan di depan rumah terdakwa saksi juga mendengar ada teriakan “mana dia..mana dia” kemudian saksi mendengar ada teriakan “bakar..bakar..bakar” dan melihat sudah ada api didepan rumah terdakwa kemudian saksi juga menegaskan bahwa saksi Shahrir Tanjung tidak melihat dan mengetahui secara langsung perbuatan dari

terdakwa Meliana ketika menyatakan keluahnya terkait volume suara adzan dimana saksi mendengarnya hanya berdasarkan penyampaian dari saudara Kasidik maka dapat disimpulkan bahwa saksi yang tidak mendengar sendiri melihat dan mengalami sendiri dan saksi hanya memperoleh keterangan dari orang lain yang bisa saja dalam penyampaiannya berbeda-beda, keterangan saksi yang tidak mendengar melihat dan mengalami sendiri dianggap tidak sah dan tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti karena saksi mendapatkan keterangannya dari orang lain dengan demikian keterangan dari saksi yang tidak mendengar sendiri melihat dan mengalami sendiri merupakan keterangan saksi *testimonium de auditu* yang pada pokoknya keterangan dari saksi diperoleh dari pendengaran orang lain dan diperoleh bukan dari apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri dari keterangan saksi yang hanya mendengar dari orang lain di sidang pengadilan tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah sehingga hakim tidak dapat menggunakannya sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa karena keterangan tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti.

Kemudian apabila dilihat dalam rumusan unsur dalam Pasal 156a KUHP sebagai pasal yang digunakan dalam kasus ini secara tegas mengatur bahwa delik tersebut harus dilakukan secara sengaja, kesengajaan yang dimaksud ialah suatu bentuk kesalahan dalam hukum pidana. Pada hakikatnya konsep kesalahan terbagi menjadi dua yaitu kesengajaan (*opzet* atau *dolus*) dan kelalaian (*culpa*) setiap tindak pidana yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan apabila terdakwa telah terbukti secara sah bersalah baik dengan sengaja atau tidak. Eddy. O.S.



Hiariej menyatakan bahwa adanya syarat “mengetahui dan menghendaki” bersifat mutlak yang berarti apabila seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan juga menghendaki.<sup>4</sup>

Berikut merupakan 3 jenis kesengajaan yaitu sebagai berikut :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)  
Merupakan suatu bentuk kesengajaan dimana adanya motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud;
2. Kesengajaan sebagai Keinsyafan Kepastian (*Opzet met zekerheidsbewustzijn*)  
Dalam kesengajaan jenis ini akibat pertamanya dikehendaki oleh pelaku sedangkan akibat kedua atau akibat lainnya tidaklah dikehendaki oleh pelaku tetapi harus terjadi dan harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku;
3. Kesengajaan sebagai Keinsyafan Kemungkinan (*dolus eventualis*)  
Bahwa yang menjadi patokan dari kesengajaan ini ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang memungkinkan akan terjadi atau kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah pelaku melakukan suatu perbuatan.  
Berdasarkan apa yang dijelaskan diatas maka dalam membuktikan

kesengajaan hakim harus mampu mengenali adanya hubungan antara perbuatan jahat yang dilakukan dengan niat jahat yang sudah dimiliki oleh terdakwa, merujuk dari putusan kasus Nomor : 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn maka belum ada satupun pembuktian terhadap niat dari terdakwa Majelis Hakim menjelaskan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa ialah menyampaikan keluhannya terkait suara adzan yang semakin keras terhadap saksi Kasini dan menyampaikan ketidaknyamanannya, dari pernyataan yang ada meskipun membuktikan bahwa terdakwa Meliana mengucapkan keluhannya dengan adanya kesengajaan tetapi

---

<sup>4</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Perinsip-Perinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 133.

unsur yang harus dibuktikan bagi Majelis Hakim seharusnya ialah unsur “sengaja” melakukan suatu tindakan penodaan agama, apabila yang dijadikan dasar utama oleh MUI dan juga Jaksa ialah kalimat “lu..ya..lu..ya itu masjid memang bikin pekak lo hari-hari bising, tak bisa tenang” maka pada ucapan tersebut sebenarnya tidak ditemukan maksud terdakwa untuk menistakan agama Islam dari kalimat tersebut terdakwa secara jelas mengetahui perbuatannya sengaja dan memiliki kehendak untuk mengurangi kebisingan dari suara adzan supaya mendapatkan ketenangan Majelis Hakim juga dalam pertimbangannya menyetujui adanya kehendak dari terdakwa melakukan perbuatannya ialah menyampaikan keluhan akibat suara adzan yang keras dari Masjid yang membuat terdakwa tidak nyaman sehingga diharapkan pengurus masjid mengurangi volume. Majelis Hakim mengakui sendiri dalam pertimbangannya bahwa bentuk dari “kesengajaan” dalam Pasal 156a huruf a KUHP hanyalah kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*) karena terdapat kalimat “semata-mata” dalam Pasal 4 Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 sebagai penjelasan dari Pasal 156a huruf a KUHP maka dapat dijelaskan bahwa Majelis Hakim sudah sepatutnya dapat membuktikan secara tegas dan jelas bahwa maksud dari terdakwa melakukan perbuatannya ialah untuk merendahkan atau menistakan agama Islam, dan juga ketegasan dari Majelis Hakim dalam membuktikan unsur “dengan sengaja” perlu dipertanyakan kembali karena adanya inkonsistensi Majelis Hakim dalam menilai penentuan volume adzan karena dalam pertimbangannya mengatakan bahwa besaran volume pengeras suara pada Masjid didasarkan pada kemaslahatan masyarakat sekitar Masjid dan memiliki volume yang wajar, tetapi sangat

disayangkan Majelis Hakim dalam melakukan pembuktian unsur “dengan sengaja” mengatakan bahwa “terdakwa seharusnya mengetahui akibat apabila suara adzan dikecilkan karena permintaan terdakwa maka jelas hal tersebut memiliki akibat menimbulkan kemarahan umat Islam” dan Majelis Hakim juga secara jelas mengesampingkan adanya fakta peristiwa tentang massa yang mendatangi rumah terdakwa dan merusak rumah terdakwa, Majelis Hakim menganggap adanya peristiwa tersebut akibat dari perbuatan terdakwa, Majelis Hakim juga tidak menjelaskan secara komprehensif mengapa “kehendak” terdakwa untuk dikecilkan volume suara adzan pasti akan berakibat timbulnya kemarahan umat Islam, padahal apabila dilihat dalam fakta persidangan maka keluhan dari terdakwa sudah seharusnya dianggap sebagai upaya menyepakati besaran suara volume adzan sesuai kemaslahatan masyarakat bukan malah dianggap menimbulkan kemarahan umat Islam mengingat terdakwa juga merupakan masyarakat setempat, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa tidak memenuhi syarat “*wettens* atau kehendak” dari unsur “dengan sengaja” dalam pasal penistaan agama karena kehendak yang dimiliki ialah mendapatkan ketenangan dan bukan “menistakan agama Islam” oleh karena itu penulis berpendapat bahwa terdakwa Meliana tidak memenuhi unsur “dengan sengaja” dalam Pasal 156a huruf a KUHP dan sudah semestinya terdakwa dibebaskan dari kasus hukum yang dihadapinya. Kemudian adanya barang bukti berupa 2 (dua) buah toa atau pengeras suara dengan merek toa warna biru dan 1 (satu) buah ampli merek toa yang menurut penulis barang bukti yang diajukan dipersidangan tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan tidak

dapat membuktikan bahwa terdakwa bersalah dan diharuskan dijatuhi pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi tentang kekuatan pembuktian alat bukti dalam kasus tersebut dengan judul **“Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Penistaan Agama (Studi Putusan Nomor : 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn)”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pembuktian yang menunjukkan terbuktinya dilakukan tindak pidana penistaan agama dalam Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn ?
2. Apakah alat bukti yang ada di dalam Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn mampu membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana penistaan agama ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang diharapkan dalam pembahasan ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sistem pembuktian dalam tindak pidana penistaan agama terhadap terdakwa dalam putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn.



2. Untuk mengetahui alat bukti yang ada dalam putusan nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn dapat membuktikan telah terjadi tindak pidana penistaan agama.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat atau kegunaan yang dapat diambil. Kegunaan atau manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan kajian dalam memperkaya serta memberikan khasanah keilmuan dan kepustakaan khususnya pengetahuan tentang pembuktian dan pertimbangan hakim dalam tindak pidana penistaan agama.

2. Manfaat Secara Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca mengenai hukum acara pidana khususnya mengenai tindak pidana penistaan agama.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terbagi menjadi tiga bab, di mana pada masing-masing bab saling berhubungan dan terkait satu dengan yang lain. Adapun gambaran yang jelas mengenai skripsi ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut :

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi mengenai latar belakang permasalahan memuat tentang hal yang menjadi dasar penelitian yang akan dilaksanakan. Kemudian juga terdapat mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang pengulasan mengenai pengertian dan tujuan hukum acara pidana, asas-asas hukum acara pidana, pengertian pembuktian, sistem pembuktian, alat-alat bukti menurut KUHP, pengertian dan pengaturan tindak pidana penistaan agama.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan tentang metode-metode penelitian yang digunakan pada pelaksanaan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, dan metode analisis data.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat uraian dan membahas mengenai kekuatan pembuktian alat bukti dalam perkara tindak pidana penistaan agama studi putusan nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn yang merujuk pada bagaimana sistem pembuktian dan alat bukti dalam perkara tindak pidana penistaan agama.

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran terkait kekuatan pembuktian alat bukti dalam perkara tindak pidana penistaan agama studi putusan nomor : 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn .

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

